

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erly Suandy. 2002. *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Kirk dan Miller. 1986. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Rahmat Syafei, “*Al Hadis, Akidah, Social, Dan Hukum*”, Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2003). Hal 125.
- Rahyu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung CV Alfabeta.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wirawan B . Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Hlm.6
- Wulandari, Phaurela Artha, Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish

Jurnal

- Cornelia Sapulette, L.M Metekhoy, R. Bakker, *Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Ambon (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ambon)* Vol.6, 1 Juni 2022.
- Eka Yuniati , Yuliandi, *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*, Vol 9 No 1 2021.
- Kumendong, Febricia Frontalin. Francis M. Hutabarat. 2020. *Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja modal : Analisa Keuangan pada Kabupaten Bandung*. Diakses melalui Jurnal <https://media.neliti.com> pada tanggal 3 April 2023.
- Mardiasmo, Hadi. 2009. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah : Kasus Kota Malang (1999-2004)*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. . <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5121> Vol.1 Nomor 1.
- Nofisa Putri, Mutia. 2019. *Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Komesaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jasa*, hlm1.
- NR Primandari, *Kontribusi dan Evektifitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode tahun 2013 -2017*, Vol 1, No. 2, 2020, 123-134.

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Noomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Noomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Website

Admin Bapenda Jakarta, 2019. Struktur Organisasi. Diakses pada tahun 2019, melalui web : <https://bprd.jakarta.go.id/struktur-organisasi>.

Admin JDIH BPK, 2022. Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diakses pada tahun 2022, melalui web: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.

Admin Kompas, 2023. . *Realisasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 Naik Jika Dibanding 2021*. Diakses melalui Web pada tanggal 1 April 2023 <https://megapolitan.kompas.com>



SURAT IZIN PEMOHON PENELITIAN



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 536 /WD/IV/2023

Jakarta, 7 Juni 2023

Lamp : -

Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth : Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru
Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Blok A Lantai 10, Jl. Prapanca Raya,
No.9

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Deva Ardelia Amanda Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 193515516068
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Gang Langgar 2 RT 04 / RW 03No.47A Jagakarsa Jakarta Selatan
HP : 081315997298
Email : devaardelia3@gmail.com

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul:
Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Studi pada Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru.

Dengan Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Muksin, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.
Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Bersama Bapak Siddiq Wicaksono, S.E (Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru)



Bersama Ibu Netty Kusmiati, A.Md (Staff Pemeroses Pelayanan dan Penetapan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru)



Bersama Bapak Edi Cahyono (Wajib Pajak Reklame Papan *Billboard*
Mandiri Sekuiritas)



Bersama Bapak Hengky Setiaji (Wajib Pajak Reklame Papan *Billboard* The
Pakubuwono House)



Bersama Bapak Muhammad Fahmi (Wajib Pajak Kain Point Rewards to Pasific
E-Voucher)



Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Baru

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi kasus Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru)

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengacu pada teori pengelolaan penerimaan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (1999) dengan 5 indikator yaitu komponen manajemen keuangan daerah yang dibutuhkan untuk mengendalikan kebijakan keuangan daerah yaitu akuntabilitas merupakan keharusan pemerintah daerah untuk memberikan tanggungjawab, menyiapkan, melaporkan, dan memberikan segala aktivitas kegiatan yang bersangkutan dengan penerimaan dan penggunaan uang masyarakat terhadap pihak yang mempunyai hak dan kewenangan, *value for money* merupakan sistem yang menyusun dan mengelola anggaran daerah yang mengarahkan perolehan hasil dan kinerja, kejujuran adalah penyelenggaraan finansial daerah perlu dipercayakan untuk staff yang mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mewujudkan peraturan-peraturan keuangan daerah, dan pengendalian merupakan penerimaan dan pengeluaran daerah yang wajib dipantau, dengan membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai.

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Pegawai Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru	Pertanyaan Wajib Pajak Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru	Pertanyaan Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru
Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk tanggungjawab pegawai apabila ada yang ingin memasang reklame? Aktivitasnya seperti apa? 2. Bagaimana pegawai dalam menyiapkan data wajib pajak untuk melakukan pemasangan reklame? 3. Bagaimana pegawai melaporkan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk tanggungjawab ibu/bapak dalam membayar pajak? Aktivitasnya seperti apa? Apakah ada kendala dalam hal tersebut? 2. Bagaimana bapak/ibu dalam menyiapkan data untuk melakukan pemasangan reklame? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk tanggungjawab bapak terhadap pegawai dan wajib pajak terhadap peraturan yang sudah ada? 2. Bagaimana pegawai melaporkan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan?
	<i>Value For Money</i> (kinerja anggaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana retribusi pajak reklame di hitung atau ditentukan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah? 2. Apakah ada anggaran khusus untuk UPPPD Kebayoran Baru? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut bapak/ibu bagaimana sistem kinerja pegawai yang ada di UPPPD? Jika ada kendala, bagaimana solusinya? 2. Menurut bapak/ibu apakah kinerja pegawai sering mengalami miss komunikasi dengan wajib pajak? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kinerja pegawai di UP3D apakah ada hambatan? 2. Apakah anggaran khusus sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan?
	Kejujuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pegawai meneliti wajib pajak dalam melakukan proses pembayaran, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan? 2. Bagaimana reklame yang sudah sesuai dengan jumlahnya, ukurannya, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut bapak/ibu Apakah reklame yang sudah sesuai dengan jumlahnya, ukurannya, dan dengan yang telah dipasang? 2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan apakah sudah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah proses pembayaran yang dilakukan wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan? 2. Bagaimana upaya bapak kepada wajib pajak apabila wajib pajak yang membuat reklame tidak sesuai ukuran dengan apa

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Pegawai Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru	Pertanyaan Wajib Pajak Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru	Pertanyaan Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru
		engan yang telah dipasang?	sesuai dengan peraturan?	yang telah didaftarkan?
Transparansi		<p>1. Apakah retribusi sudah diberikan sosialisasi kepada wajib pajak yang ingin memasang reklame?</p> <p>2. Apakah sudah adanya pemasangan peraturan mengenai biaya retribusi?</p>	<p>1. Menurut bapak/ibu apakah yang sudah dibayarkan sudah sesuai oleh peraturan daerah ?</p> <p>2. Apakah bapak/ibu pernah melebihi pembayaran kepada pegawai agar proses dilakukan dengan cepat?</p>	<p>1. Bagaimana retribusi yang ada didalam peraturan tersampaikan ke masyarakat? Apa saja upayanya pak?</p> <p>2. Apakah penerimaan pajak reklame pada tahun 2022 sudah berjalan evektif?</p>
Pengendalian		<p>1. Bagaimana pegawai mengawasi proses pemasangan reklame?</p> <p>2. Bagaimana solisi jika wajib pajak memasang reklame yang sudah jatuh tempo dan bagaimana cara mengawasinya?</p>	<p>1. Menurut bapak/ibu bagaimana mengetahui reklame yang sudah jatuh tempo?</p> <p>2. Apakah bapak/ibu jika reklame sudah jatuh tempo langsung melakukan pembayaran atau menunggu surat teguran dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran baru</p>	<p>1. Bagaimana upaya agar wajib pajak membayar pajak tepat waktu?</p> <p>2. Bagaimana upaya agar penerimaan pajak reklame di UP3D terus meningkat?</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Siddiq Wicaksono. SE

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

-
1. Bagaimana bentuk tanggungjawab bapak terhadap pegawai dan wajib pajak terhadap peraturan yang sudah ada?

Jawab : “Tanggung jawab saya sebagai pimpinan adalah melakukan bimbingan (sosialisasi), pembinaan terkait tugas pokok fungsi sebagai kantor pelayanan pemungutan pajak daerah. Dan terhadap wajib pajak kita melayani dengan prinsip atau sesuai moto Bapenda Provinsi DKI Jakarta yaitu mudah, ramah, dan nyaman. Dalam melakukan sosialisai kepada wajib pajak terkait peraturan pajak yang berlaku dengan penggunaan surat atau melalui pengumuman di flyer maupun media masa/media elektronik, lalu pajak yang dikumpulkan menjadi kas daerah (APBD) lalu didistribusikan ke masing-masing teknis unit.”

2. Bagaimana pegawai melaporkan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan?

Jawab : “Sebenarnya ada sih beberapa wajib pajak memasang reklame liar tanpa sepengetahuan kita, makanya kita kasih surat teguran. Jadi apabila wajib pajak reklame jika belum melakukan daftar kita mengeluarkan surat himbuan pendaftaran, lalu yang kedua apabila sudah terdaftar tetapi belum melakukan perpanjangan masa tayang kita sampaikan surat himbuan untuk daftar ulang, dan apabila masih belum melakukan pendaftaran atas reklame tersebut akan

dilakukan usulan kepada satpolPP untuk dilakukan pembongkaran karena dianggap sebagai reklame liar.”

3. Bagaimana kinerja pegawai di UP3D apakah ada hambatan?

Jawab : “Kinerja dari UP3D itu sendiri sih masih ada hambatan ya contohnya SDM pengawasan di lapangan itu kurang sigap dan sering bermalasan-malasan sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak berjalan efektif dan efisien. Hal ini memang perlu adanya pelatihan agar terciptanya kinerja yang baik bagi UPPPD dan wajib pajak.”

4. Apakah anggaran khusus sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan?

Jawab : “Kalau anggaran belum cukup untuk pengawasan reklame.”

5. Apakah proses pembayaran yang di lakukan wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan?

Jawab : “Pembayaran jelas karena penetapan proses pajak reklame sudah sesuai dengan ketentuan, lalu pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan SKPD pajak reklme, apabila ada terjadi tunggakan akan dilakukan surat himbauan, lalu surat pemberitahuan pemasangan sticker, pemasangan sticker, sampai dengan penagihan aktif (surat paksa terhadap penunggak pajak).”

6. Bagaimana upaya bapak kepada wajib pajak apabila wajib pajak yang membuat reklame tidak sesuai ukuran dengan apa yang telah didaftarkan?

Jawab : “Ya akan melakukan pembetulan SKPD pajak reklame sesuai dengan ukuran yang sebenarnya dan menegor.”

7. Bagaimana retribusi yang ada didalam peraturan tersampaikan ke masyarakat?

Apa saja upayanya pak?

Jawab : “Akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait untuk peraturan pajak reklame yang berlaku melalui surat atau melalui pengumuman di flayer atau media masa/media elektronik, lalu pajak yang dikumpulkan menjadi kas daerah dari itu menjadi APBD lalu anggaran didistribusikan ke masing-masing teknis melalu dinas teknis, pembangunan jalan dinas PU, untuk pembangunan saluran air selokan bendungan dinas sumber daya air dinas sumber daya air, pembangunan sekolah dinas pendidikan, DPMPTSP atau dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, satpolPP. Karena pajak hanya memungut dengan pembayaran melalui BANK DKI dengan rekening kas daerah yang akan masuk ke APBD kemudian di salurkan ke dinas-dinas terkait.”

8. Apakah penerimaan pajak reklame pada tahun 2022 sudah berjalan efektif?

Jawab : “belum karena wajib pajak belum melakukan pendaftaran ulang atau perpanjangan dikarenakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 jadi banyak yang belum mendaftarkan ulang tetapi sosialisasi peraturan pajak reklame sudah dilakukan dengan optimal kepada wajib pajak dan dinas-dinas terkait. Dalam hal ini, pegawai juga tidak melakukan tindakan pungli terhadap wajib pajak.”

9. Bagaimana upaya agar wajib pajak membayar pajak tepat waktu?

Jawab : “Kita mengevaluasikan saat wajib pajak menerima SKPD kita informasikan jatuh tempo pembayaran itu 30 hari kalender sejak tanggal terbit

SKPD, lalu kita informasikan juga apabila pembayaran melewati batas jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% perbulan.”

10. Bagaimana upaya agar penerimaan pajak reklame di UP3D terus meningkat?

Jawab : “Melakukan perubahan peraturan gubernur terkait nilai sewa reklame menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau pertumbuhan ekonomi, lalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan reklame antara lain adalah dinas cipta karya dan tata ruang, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, SatpolPP untuk menegakan peraturan daerah.”



Nama Informan : Ibu Netty Kusmiati, A.Md

Jabatan : Staff Pemesanan Pelayanan dan Penetapan

-
1. Bagaimana bentuk tanggungjawab pegawai apabila ada yang ingin memasang reklame? Aktivitasnya seperti apa?

Jawab : “Paling kasih formulir pendaftaran, dijelasin persyaratan apa aja, di jelasin perkiraan pajaknya berapa seperti itu.”

2. Bagaimana pegawai dalam menyiapkan data wajib pajak untuk melakukan pemasangan reklame?

Jawab : “Disiapkan formulir, dan disiapkan perhitungan pajaknya kira-kira berapa, tapi ada juga wajib pajak yang tidak lengkap dalam menyiapkan persyaratan. Sehingga, terhambatnya proses penginputan data untuk mencetak SKPD.”

3. Bagaimana pegawai melaporkan wajib pajak yang belum melakukan pembayaran?

Jawab : “Biasanya menerbitkan surat himbauan pembayaran apabila wajib pajak yang melakukan pemasangan reklame liar dan telat bayar saat sudah jatuh tempo.”

4. Bagaimana retribusi pajak reklame di hitung atau ditentukan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah?

Jawab : “Kalau untuk perhitungan penentuan retribusi pajak reklame biasanya didasarkan pada peraturan daerahnya ya, beberapa faktor yang umum dipertimbangkan dalam penentuan retribusi itu biasanya luas reklame, lokasi

pemasangan, durasi pemasangan, jenis reklame, dan tingkat tarif yang ditetapkan.”

5. Apakah ada anggaran khusus untuk UPPPD Kebayoran Baru?

Jawab : “Anggaran khusus sih ga ada Cuma untuk anggaran pengawasan iu belum mencukupi untuk pemotongan beberapa reklame aja contohnya untuk reklame yang menyalahi aturan lalu dilakukannya pemotongan tiang dan penertiban.”

6. Bagaimana pegawai meneliti wajib pajak dalam melakukan proses pembayaran, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan?

Jawab : “Menelitinya dari bukti pembayaran BANK DKI, pastinya sudah sesuai dengan ketetapannya kecuali jika telat bayar pasti ada denda.”

7. Bagaimana reklame yang sudah sesuai dengan jumlahnya, ukurannya dengan yang telah dipasang?

Jawab : “Kalau untuk reklame pendaftaran baru harus di ukur dulu dengan petugas lapangan kondosi dilapangannya benar atau engga ukurannya denegan yang dia mohonkan segitu dan selanjutnya ketetapannya itu kita teapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan dan sudah pasti ketetapannya sesuai dengan kondisi dilapangannya.”

8. Apakah retribusi sudah diberikan sosialisasi kepada wajib pajak yang ingin memasang reklame?

Jawab : “Kalau untuk pergub karena ga semua wajib pajak memantau dan biasanya kalau ada pergub yang baru kita pasti infokan ke wajib pajak misalnya ada perubahan tarif dan kelas jalan pasti di infokan terlebih dahulu.”

9. Apakah sudah adanya pemasangan peraturan mengenai biaya retribusi?

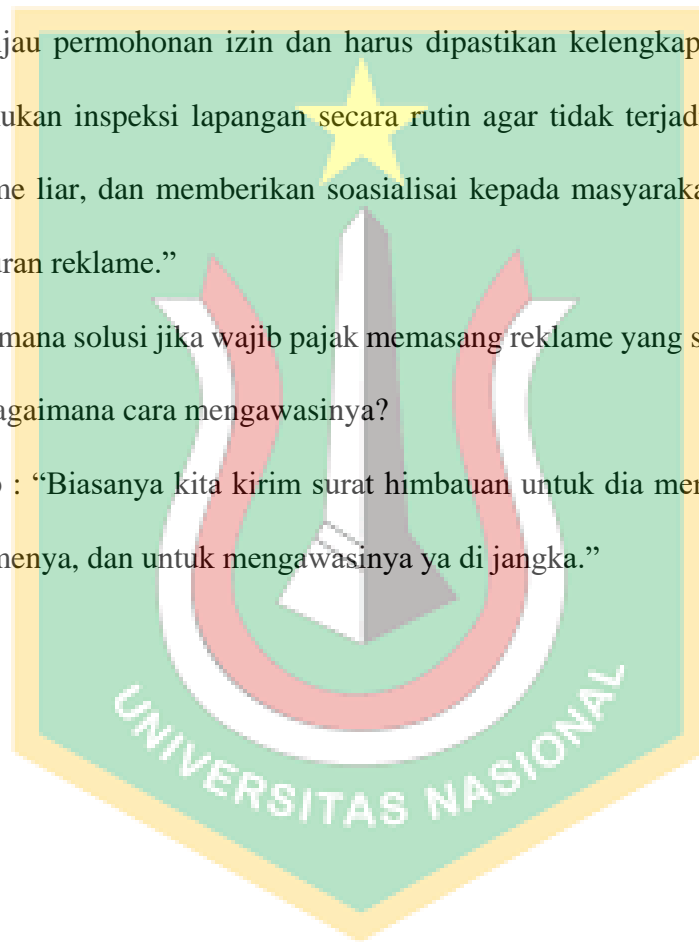
Jawab : “Pergub atau biaya itu biasanya sudah dipublis diumumkan atau di internet, dan seharusnya peraturan tentang pajak sudah bisa diakses.”

10. Bagaimana pegawai mengawasi proses pemasangan reklame?

Jawab : “Yang pertama ya harus memahami peraturan reklame yang berlaku, meninjau permohonan izin dan harus dipastikan kelengkapannya, kemudian melakukan inspeksi lapangan secara rutin agar tidak terjadinya pemasangan reklame liar, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya peraturan reklame.”

11. Bagaimana solusi jika wajib pajak memasang reklame yang sudah jatuh tempo dan bagaimana cara mengawasinya?

Jawab : “Biasanya kita kirim surat himbauan untuk dia mendaftar atas pajak reklamennya, dan untuk mengawasinya ya di jangka.”



Nama Informan : Edi Cahyono

Jenis Reklame : (Papan *Billboard* Mandiri Sekuiritas) Wajib Pajak Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran
Baru

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab ibu/bapak dalam membayar pajak?

Aktivitasnya seperti apa? Apakah ada kendala dalam hal tersebut?

Jawab : “Sebagai warga negara yang taat pajak pajak reklame sebetulnya harus membayar sesuai dengan aturan pemerintah, aktifitasnya yaitu bisa datang langsung dan bisa melalui online karena sekarang masih masa transisi. Kendalanya hanya di jumlah pegawainya sih jadi proses pencetakan SKPDnya agak lama.”

2. Bagaimana bapak/ibu dalam menyiapkan data untuk melakukan pemasangan reklame?

Jawab : “Datanya ada surat permohonan, surat kuasa, desain reklame, foto titik lokasi reklame, peta jalan, bukti pembayaran dan untuk perpanjangan melampirkan berkas pajak yang lama atau pajak sebelumnya.”

3. Menurut bapak/ibu bagaimana sistem kinerja pegawai yang ada di UPPPD?

Jika ada kendala, bagaimana solusinya?

Jawab : “Kalau pegawainya baik-baik kalau ada kendala memberikan solusi, Cuma kinerja pegawainya agak sedikit lambat karena dari pegawainya sendiri yang kurang sigap.”

4. Menurut bapak/ibu apakah kinerja pegawai sering mengalami miss komunikasi dengan wajib pajak?

Jawab : “Kadang ada beberapa wajib pajak yang suka miss komunikasi karena mereka juga belum paham dengan peraturan pajak.”

5. Menurut bapak/ibu Apakah reklame yang sudah sesuai dengan jumlahnya,ukurannya,dengan yang telah dipasang?

Jawab : “Ya harus sesuai dengan apa yang kita ajukan karena kalau lebih besar kena denda dan kalau lebih kecil ya tidak mungkin, dan sisa ukurannya sesuai dilapangan juga harus dibayar karena petugas selalu mengecek terlebih dahulu reklame yang akan dipasang.”

6. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan?

Jawab : “Kalau yang taat ya sesuai dengan lokasi yang diajukan dan kalau tidak taat ya kadang melanggar akan ditindak dan kalau curang tidak sesuai dengan ukurannya dan reklame yang menjorok ke jalan itu akan melanggar aturan.”

7. Menurut bapak/ibu apakah yang sudah dibayarkan sudah sesuai oleh peraturan daerah ?

Jawab : “Semua yang dibayarkan sesuai dengan peraturan daerah karena sistem pemayaran pajaknya sesuai dengan perda pemerinta tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah.”

8. Apakah bapak/ibu pernah melebihi pembayaran kepada pegawai agar proses dilakukan dengan cepat?

Jawab : “Kalau jaman sekarang tidak ada seperti itu tidak ada uang tip.”

9. Menurut bapak/ibu bagaimana mengetahui reklame yang sudah jatuh tempo?

Jawab : “Kan sudah tercantum dalam SKPD (surat ketetapan pajak daerah) jatuh temponya.”

10. Apakah bapak/ibu jika reklame sudah jatuh tempo langsung melakukan pembayaran atau menunggu surat teguran dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran baru?

Jawab : “Ya langsung mengurus proses perpanjangannya sesuai dengan aturan, karena kalau terlambat akan terkena denda.”



Nama Informan : Henky Setiaji

Jenis Reklame : (Papan *Billboard* The Pakubuwono House) Wajib Pajak
Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD)
Kebayoran Baru

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab ibu/bapak dalam membayar pajak?

Aktivitasnya seperti apa? Apakah ada kendala dalam hal tersebut?

Jawab : “Ya mengikuti aturan yang ada karena ini tanggungjawab kita dan misalnya ada tunggukan takut dipasang sticker jadi kita tetap membayar pajak reklame sebelum jatuh tempo, dan kita datang langsung Cuma kendalanya jika datang secara langsung ya saya harus mengantri terlebih dahulu karena prosesnya ya cukup lama.”

2. Bagaimana bapak/ibu dalam menyiapkan data untuk melakukan pemasangan reklame?

Jawab : “Yang saya bawa ada formulir yang disediakan UP3D kebayoran baru, lalu dan mengisi form, lalu membawa foto reklame sebelumnya, ukuran dari reklame tersebut, dan perizinan tahun sebelumnya.”

3. Menurut bapak/ibu bagaimana sistem kinerja pegawai yang ada di UPPPD?

Jika ada kendala, bagaimana solusinya?

Jawab : “Kalau untuk pegawainya sendiri ya sudah informatif ya cuma kinerja dari pegawainya itu sendiri agak lamban jadi terasa lama saya nunggu antriannya.”

4. Menurut bapak/ibu apakah kinerja pegawai sering mengalami miss komunikasi dengan wajib pajak?

Jawab : “Untuk miss komunikasi kita pernah mengalami karena saya agak sulit memahami informasi yang di berikan pegawai.”

5. Menurut bapak/ibu Apakah reklame yang sudah sesuai dengan jumlahnya,ukurannya,dengan yang telah dipasang?

Jawab : “Sudah sesuai sih ukurannya dengan yang sudah didaftarkan.”

6. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan?

Jawab : “Sudah sih karena selalu diinfokan dari pegawai dan memberikan form yang berisi peraturan baru, petugasnya juga informatif.”

7. Menurut bapak/ibu apakah yang sudah dibayarkan sudah sesuai oleh peraturan daerah ?

Jawab : “Sudah sangat sesuai, karena sudah ada perhitungannya dengan yang ada ditagihan.”

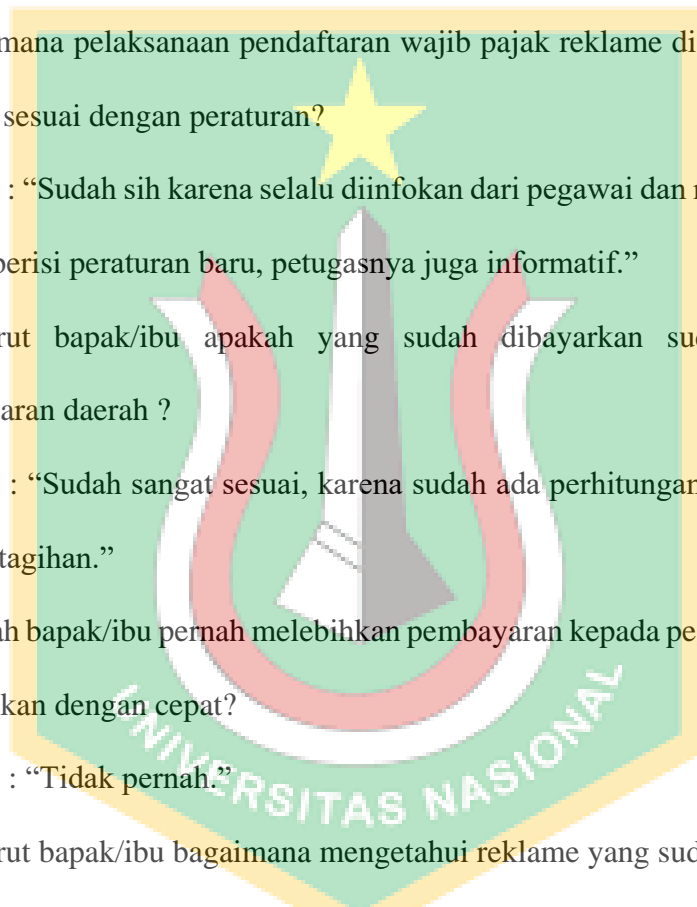
8. Apakah bapak/ibu pernah melebihi pembayaran kepada pegawai agar proses dilakukan dengan cepat?

Jawab : “Tidak pernah.”

9. Menurut bapak/ibu bagaimana mengetahui reklame yang sudah jatuh tempo?

Jawab : “Sudah tercantum pada SKPD dan pegawainya juga sangat informatif dan aktif memberitahu jika pajak reklame akan jatuh tempo.”

10. Apakah bapak/ibu jika reklame sudah jatuh tempo langsung melakukan pembayaran atau menunggu surat teguran dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran baru



Jawab : “Pasti langsung saya bayarkan sebelum dapat surat teguran karena jika ada surat teguran takut dibungkar dan malu jika di tempel sticker belum bayar pajak dan belum melakukan pelunasan.”



Nama Informan : Muhammad Fahmi

Jenis Reklame : Kain (Point Rewards to Pasific E-Voucher) Wajib Pajak
Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD)
Kebayoran Baru

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab ibu/bapak dalam membayar pajak?

Aktivitasnya seperti apa? Apakah ada kendala dalam hal tersebut?

Jawab : “Saya biasanya membayar sebelum jatuh tempo yang sudah ditetapkan pada SKPD, saya lebih suka datang langsung kendalanya paling pada antrian.”

2. Bagaimana bapak/ibu dalam menyiapkan data untuk melakukan pemasangan reklame?

Jawab : “Untuk data sih kita diminta ga terlalu ribet ya ada KTP, foto reklame, NPWP, dan misal di atas 10 meter harus ada ijin dari PTSP, kalo manual kita harus isi segala macam formulir dan kalau online tinggal isi data pribadi aja dan ga minta harus membuat surat pernyataan tanpa harus mengisi dan menempelkan materai. Tetapi lebih baik datang langsung karena kalau online lebih lama prosesnya”

3. Menurut bapak/ibu bagaimana sistem kinerja pegawai yang ada di UPPPD?

Jika ada kendala, bagaimana solusinya?

Jawab : “Kinerjanya pegawainya ya bisa diliat sendiri kalau datang langsung webnya error sehingga terjadi antrian yang panjang dan proses penginputan data jadi terhambat, solusinya ya diperbaiki aja web nya supaya tidak sering terjadi masalah gangguan.”

4. Menurut bapak/ibu apakah kinerja pegawai sering mengalami miss komunikasi dengan wajib pajak?

Jawab : “Saya menemukan mis komunikasi dengan pegawai dulu pernah dapat surat teguran karena belum membayar pajak, jatuh temponya tanggal 21 dapat suratnya tanggal 25 jadi saya terkena denda pembayaran karena telat bayar.”

5. Menurut bapak/ibu Apakah reklame yang sudah sesuai dengan jumlahnya,ukurannya,dengan yang telah dipasang?

Jawab : “Sudah sesuai dengan yang didaftarkan dan apa yang dipasang.”

6. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan?

Jawab : “Sudah sesuai dengan SOP.”

7. Menurut bapak/ibu apakah yang sudah dibayarkan sudah sesuai oleh peraturan daerah ?

Jawab : “Ya sudah sesuai dengan peraturan daerah dan sesuai dengan nilai yang sudah ditetapkan.”

8. Apakah bapak/ibu pernah melebihkan pembayaran kepada pegawai agar proses dilakukan dengan cepat?

Jawab : “Tidak pernah melakukan pembayaran lebih.”

9. Menurut bapak/ibu bagaimana mengetahui reklame yang sudah jatuh tempo?

Jawab : “Ya itu liat di SKPD di situ ada tanggal aktifnya sampai kapan.”

10. Apakah bapak/ibu jika reklame sudah jatuh tempo langsung melakukan pembayaran atau menunggu surat teguran dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran baru?

Jawab : “Langsung saya bayarkan karena saya wajib pajak yang patuh dengan peraturan.”



LAPORAN HASIL TURNITIN

Cek Skripsi Deva Ardelia_193515516068

ORIGINALITY REPORT

15% SIMILARITY INDEX **13%** INTERNET SOURCES **6%** PUBLICATIONS **10%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%
2	eprints.untirta.ac.id Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	repository.unas.ac.id Internet Source	1%
5	journal.upy.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Deva Ardelia Amanda Putri Hermawan
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Maret 2000
Alamat : Gg. Langgar 2 Kebagusan No. 47A RT 004 RW

003 Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Email : devaardelia3@gmail.com
Pendidikan Formal

1. SDN Jagakarsa 05 Pagi
2. SMP Pattimura Jagakarsa
3. SMK Pembangunan Jaya YAKAPI
4. Universitas Nasional – S1 (Administrasi Publik)

